

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden, serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk mengkaji kepastian hukum dan potensi konflik kepentingan yang muncul akibat putusan tersebut. Isu hukum utama yang diangkat adalah apakah perubahan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden sesuai dengan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan nondiskriminasi yang diatur dalam UUD 1945, serta apakah putusan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia tersebut merupakan isu kompleks yang memiliki implikasi luas, termasuk dari segi hukum, politik, sosial, dan budaya. Meski putusan ini memicu pro dan kontra, dalam jangka panjang, tantangan utamanya adalah memastikan kualifikasi dan integritas calon presiden dan wakil presiden tetap terjaga, di samping memperhatikan faktor usia. Dampak lain yang muncul adalah potensi perubahan dalam partisipasi politik, representasi, serta regenerasi kepemimpinan, yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keseimbangan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, Pencalonan Presiden

ABSTRACT

This study aims to analyze the Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 which changes the minimum age limit for presidential and vice presidential nominations, and its implications for the Indonesian constitutional system. The study uses a legislative, conceptual, and comparative approach to examine legal certainty and potential conflicts of interest arising from the decision. The main legal issues raised are whether the change in the age limit for presidential and vice presidential nominations is in accordance with the principles of democracy, equality, and non-discrimination stipulated in the 1945 Constitution, and whether the decision can create legal uncertainty in the general election process in Indonesia. The results of the study show that the determination of the age limit is a complex issue that has broad implications, including from a legal, political, social, and cultural perspective. Although this decision has sparked pros and cons, in the long term, the main challenge is to ensure that the qualifications and integrity of presidential and vice presidential candidates are maintained, in addition to considering the age factor. Another impact that arises is the potential for changes in political participation, representation, and leadership regeneration, which require special attention to maintain balance in the Indonesian democratic system.

Keywords: *Juridical Analysis, Constitutional Court Decision, Age Limit, Presidential Candidacy*